

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan per kapita biasanya dilakukan di negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di negara-negara sedang berkembang tersebut.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2004:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Simon Kuznets (Jhingan, 2008:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan

ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu tercermin dari PDB riil yang merupakan indikator utama untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah meningkat. Apabila PDB riil meningkat maka seluruh kegiatan ekonomi dapat terpenuhi, sehingga proses-proses ekonomi menjadi lancar yang pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat yang secara otomatis diikuti oleh kesejahteraan yang pesat.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB atas harga berlaku maupun harga konstan. PDRB didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku dapat menunjukkan pergeseran serta struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Sukirno (2005) menjelaskan bahwa dalam analisis makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di segi lain, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau suatu wilayah dalam jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi ini sendiri dibagi menjadi tiga aspek, yaitu :

1. Aspek yang bersumber dari perbedaan antara tingkat pertumbuhan potensial yang dapat dicapai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tercapai. Investasi yang dilakukan saat ini dapat menambah persediaan barang-barang modal di masa yang akan datang sehingga potensi suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan bertambah pula. Kemajuan teknologi, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan produktivitas mereka juga dapat menambah produksi barang dan jasa. Selanjutnya, kenaikan faktor-faktor tersebut tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke taraf potensialnya. Sebaliknya, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang makin besar, serta masalah di luar masalah ekonomi (sosial, politik, pertahanan dan keamanan) yang bertambah rumit pula.
2. Aspek selanjutnya adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Ketika suatu negara atau wilayah memerlukan pertumbuhan PDB sejumlah tertentu untuk mengurangi permasalahan pengangguran yang terjadi, namun pada kenyataannya pertumbuhan PDB yang tercapai tidaklah sesuai dengan yang direncanakan dan akan berakibat pada terjadinya permasalahan

pengangguran tidak dapat teratasi, sehingga negara atau wilayah tersebut perlu memikirkan cara-cara untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya.

3. Aspek yang terakhir adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Pergerakan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi suatu negara atau wilayah sifatnya selalu fluktuatif. Ada akalnya berkembang pesat, dan ada kalanya berjalan lambat bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan nasional yang merujuk pada PDB dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya, perlu didasari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional PDB dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Rumusan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah: (Sadono Sukirno, 2002:19)

$$LPE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

LPE= pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

PDB<sub>t</sub> = nilai PDB tahun t

PDB<sub>t-1</sub> = nilai PDB tahun sebelumnya

### 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan dapat dibedakan menjadi dua aliran pemikiran, yakni teori neoklasik dan modern. Dalam teori neoklasik pertumbuhan ekonomi yang

ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi sangat ditentukan oleh faktor produksi berupa kuantitas tenaga kerja dan modal. Peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan input produksi lainnya tidak mendapat perhatian secara eksplisit atau dianggap konstan (Tambunan, 2003:45). Berikut faktor penentu pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik dan modern:

### 2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Neoklasik Sollow

Model Sollow merupakan pengembangan dari model Harrod-domar yang hanya memfokuskan pada pembentukan modal. Teori ini menambahkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi berupa tenaga kerja dan teknologi. Namun teknologi dianggap sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi diasumsikan bersifat eksogen atau dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Todaro, 2000:116). Model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan Sollow, model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut Dornbusch *et al* dalam (Siregar, 2006:26)

$$Y = A f(K, L)$$

Dimana:

Y = output nasional (kawasan)

K = modal (*kapital*) fisik

L = tenagakerja

A = teknologi

### 2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Menurut Romer dalam Todaro (2004:168), teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2003:21).

Model pertumbuhan endogen sedikit berbeda dengan model Sollow, Model pertumbuhan endogen memodifikasi fungsi produksi agregat menjadi (Siregar, 2006: 27):

$$Y = A f(K, H, L)$$

Dimana:

Y = output

A = teknologi

K = modal

L = tenaga kerja

H = Sumber daya manusia

Fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan Sollow.

### **2.1.2.3 Teori *Human Capital***

Teori *human capital* berasumsi bahwa, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap penambahan satu tahun sekolah berarti disuatu pihak, peningkatan kemampuan kerja dan penghasilan seseorang. Akan tetapi dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. (Simanjuntak, 1998:70)

Menurut Theoderore W. Schultz (dalam Mukhlis, 2010:1), proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, namun merupakan suatu investasi yang amat besar dan berharga. Investasi dalam bidang pendidikan hasilnya tidak akan dirasakan dalam waktu yang singkat, tetapi akan dirasakan di kemudian hari, dan memerlukan waktu yang relatif lama. Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*intensive labor*) tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*intensive brain*).

Terdapat dua pendekatan penting dalam teori *human capital* yaitu: pendekatan Nelson Phelps dan pendekatan Lucas. Pendekatan Nelson-Phelp, Agion dan Howitt (Meir dan Raunch dalam Mukhlis 2010:2) menyimpulkan bahwa *human capital* merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Munculnya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan

diberbagai Negara lebih disebabkan oleh perbedaaan dalam *stock human capital*. Agion dan howitt mendukung pendapat Nelson-phelp tentang stock Human Capital yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja yang lebih terdidik dan ahli akan lebih mampu mengisi kualifikasi lapangan pekerjaan yang ditentukan. Dengan kata lain pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mampu merespon inovasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Jadi, peningkatan *stock human capital* dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara melalui produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan akibat dari pendidikan yang diperolehnya.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi namun justru kemunduran ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran



rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per-kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan landasan untuk menerima bantuan dana dari pihak internasional, seperti Bank Dunia atau negara lain. Sedangkan bagi para pelaku sektor usaha atau perusahaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Menurut Kuznets (dalam Todaro, 2006), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Kuznets juga mengemukakan bahwa ada setidaknya enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui di hampir semua negara yang sekarang telah menjadi negara maju (*developed countries*) atau wilayah maju apabila berbicara dalam konteks ekonomi regional. Enam karakteristik proses pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets tersebut antara lain :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.

4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk yang ada.

Sukirno (2005) menjelaskan bahwa dalam analisis makroekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di segi lain, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau suatu wilayah dalam jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi ini sendiri dibagi menjadi tiga aspek, yaitu :

4. Aspek yang bersumber dari perbedaan antara tingkat pertumbuhan potensial yang dapat dicapai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tercapai. Investasi yang dilakukan saat ini dapat menambah persediaan barang-barang modal di masa yang akan datang sehingga potensi suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan bertambah pula. Kemajuan teknologi, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan produktivitas mereka juga dapat menambah produksi barang dan jasa. Selanjutnya, kenaikan faktor-faktor tersebut tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke taraf potensialnya. Sebaliknya, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran

yang makin besar, serta masalah di luar masalah ekonomi (sosial, politik, pertahanan dan keamanan) yang bertambah rumit pula.

5. Aspek selanjutnya adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Ketika suatu negara atau wilayah memerlukan pertumbuhan PDB sejumlah tertentu untuk mengurangi permasalahan pengangguran yang terjadi, namun pada kenyataannya pertumbuhan PDB yang tercapai tidaklah sesuai dengan yang direncanakan dan akan berakibat pada terjadinya permasalahan pengangguran tidak dapat teratasi, sehingga negara atau wilayah tersebut perlu memikirkan cara-cara untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya.
6. Aspek yang terakhir adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Pergerakan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi suatu negara atau wilayah sifatnya selalu fluktuatif. Ada kalanya berkembang pesat, dan ada kalanya berjalan lambat bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan nasional yang merujuk pada PDB dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya, perlu didasari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional PDB dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Rumusan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah: (Sadono Sukirno, 2002:19)

$$\text{LPE} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

LPE= pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

PDBt = nilai PDB tahun t

PDBt-1 = nilai PDB tahun sebelumnya

### **2.1.3.1 Faktor – faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut M.L. Jhingan (2003:67), secara umum faktor penentu pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor penentu ekonomi terdiri dari sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan faktor penentu non ekonomi yaitu faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan administrasi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000). Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari PDB potensial/output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

#### 1. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam suatu proses produksi, peran sumber daya manusia sangat vital yaitu sebagai tenaga kerja yang bertugas mengombinasikan atau mengolah beberapa faktor produksi dalam

kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan dalam penciptaan teknologi baru dan modern untuk mendukung pekerjaan dan mengoptimalkan hasil produksi.

## 2. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak, gas, hutan, air, tambang dan bahan-bahan mineral lainnya.

## 3. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

## 4. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995).

### **2.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan (Arsyad, 2004). Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional, unsur regional atau wilayah

merupakan bagian dalam analisisnya. Wilayah yang dimaksud dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Target pertumbuhan ekonomi satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan potensi ekonomi yang ada di tiap-tiap wilayah juga berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan juga harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah atau daerah.

Mengingat Indonesia telah masuk dalam era otonomi daerah, maka tiap-tiap daerah harus membuat dan menerapkan kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun dapat ditingkatkan.

#### **2.1.4 Teori Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM).**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) ialah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun manfaat dari IPM diantaranya yaitu

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

#### **2.1.4.1 Sejarah Indeks Pembangunan Manusia**

IPM dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghand Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Dalam hal ini, Amartya Sen menggambarkan IPM sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena batasannya. IPM lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. IPM juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan

manusianya. Selain itu IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yang terdiri dari :

- Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa “bobotnya 2/3” dan kombinasi pendidikan dasar, menengah dan atas dengan bobot 1/3.
- Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritas daya beli.

#### 2.1.4.2 Unsur-Unsur Dasar Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur IPM maka digunakan tiga unsur dasar pembangunan manusia yaitu :

##### 1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi :

- a. Angka kematian bayi.
- b. Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
- c. Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- d. Persentase penduduk yang sakit “morbidity”.
- e. Rata-rata lama sakit.
- f. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- g. Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
- h. Persentase balita kekurangan gizi.
- i. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
- j. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
- k. Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- i. Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.



## 2. Pendidikan

Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

- a. Angka melek huruf.
- b. Rata-rata lama sekolah.
- c. Angka partisipasi sekolah.
- d. Angka putus sekolah “Drop Out” dan lain-lain.

## 3. Standar Hidup Layak

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak

Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- a. Jumlah yang bekerja.
- b. Jumlah pengangguran terbuka.
- c. Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- d. PDRB riil per kapita.

### **2.1.4.3 Menghitung Indeks Komponen**

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

## 1. Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$$

Keterangan :

I = Indeks Komponen

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH<sub>min</sub> = Angka Harapan Hidup Terendah

AHH<sub>maks</sub> = Angka Harapan Hidup Tertinggi

## 2. Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$

Keterangan :

I = Indeks Komponen

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS<sub>min</sub> = Harapan Lama Sekolah Terendah

HLS<sub>maks</sub> = Harapan Lama Sekolah Tertinggi

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

Keterangan :

I = Indeks Komponen

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

RLS<sub>min</sub> = Rata-Rata Lama Sekolah Terendah

RLS<sub>max</sub> = Rata-Rata Lama Sekolah Tertinggi

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{IHLS - IRLS_{\text{min}}}{2}$$

Keterangan :

I = Indeks Komponen

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

### 3. Dimensi Daya Beli

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Keterangan :

I = Indeks Komponen

In = Indeks Komponen

Pengeluaran<sub>min</sub> = Pengeluaran Terendah

Pengeluaran<sub>maks</sub> = Pengeluaran Tertinggi

### 4. Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran} \times 100}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

I = Indeks Komponen

### **2.1.5 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia**

Menurut Mulyadi S. (2014) dalam buku edisi ke lima mengatakan bahwa pengertian ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia yang salah satunya seperti ketenagakerjaan di Indonesia meliputi permintaan dan penawaran tenaga kerja, perencanaan ketenagakerjaan dan penduduk serta pembangunan ekonomi. Teori untuk ekonomi sumber daya manusia ini peneliti menggunakan teori Adam Smith (1729-1790) yang menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa. Serta alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Sehingga setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif ini merupakan syarat perlu (Necessary Condition) bagi pertumbuhan ekonomi

### **2.1.6 Tingkat Pendidikan**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu modal utama seseorang untuk mendapatkan

pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatan yang diterima.

Pendidikan adalah “Suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat”. Intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan :

1. Proses pelaksanaan pendidikan
2. Distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan
3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan

Pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

Masalah-Masalah Pokok Ekonomi Pendidikan Karena proses pendidikan melibatkan penggunaan sejumlah sumber daya yang langka, timbulah sejumlah permasalahan yang jawabannya harus dipandang dari sudut analisa ekonom. Untuk dapat menemukan solusi yang memadai, diperlukan pemikiran-pemikiran Ekonom dan kerja sama dari para ahli pendidikan, sosiologi, psikologi dan sebagainya. Terdapat lima pokok permasalahan yang berkaitan dengan persoalan ini, yaitu :

1. Identifikasi dan pengukuran nilai-nilai ekonomi pendidikan Dalam hal ini, meliputi bagaimana perhitungan atau estimasi dari biaya pendidikan yang dikeluarkan dan keuntungan pendidikan yang diperoleh.

2. Alokasi sumber daya dalam pendidikan

Proses pendidikan meliputi hasil keluaran proses pendidikan dari penetapan sejumlah input dalam pendidikan.

3. Gaji guru

Disesuaikan dengan tingkat dan faktor penentu kemampuan yang dimilikinya

4. Anggaran/Keuangan pendidikan

Siapakah yang harus membayar pendidikan ? Apakah pemerintah harus mendukung pendidikan di sektor pemerintah dan swasta ? Jika ya, Pada level yang mana pemerintah harus mengambil bagiannya ? Jika ada subsidi, apakah harus diberikan pada lembaga pendidikannya atau pada peserta didiknya ?

5. Perencanaan pendidikan

Meliputi pembahasan perencanaan pelaksanaan pendidikan yang masuk akal, berbagai macam pendekatan terhadap perencanaan, dan beberapa makro dan mikro dari model perencanaan yang tersedia/disediakan

Menurut Todaro (dalam Aini, 2008:20) pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu:

1. Meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan.
2. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja.
3. Memungkinkannya penyerapan Informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien.

4. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang.
6. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Namun sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas. Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen.

Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas.

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui

berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

### **2.1.7 Kesehatan**

Indikator kesehatan yaitu merupakan salah satu tolak ukur dalam sebuah kesehatan juga turut mempengaruhi kualitas Sumber daya manusia di Jawa Barat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Jika angka harapan hidup meningkat, berarti menandakan kesehatan semakin membaik, dan pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus. Indikator Kesehatan juga harus memenuhi persyaratan indikator secara umum yaitu : *simple* (sederhana), *Measurable* (dapat diukur), *Attributable* (bermanfaat), *Reliable* (dapat dipercaya), dan *Timely* (Tepat waktu).

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Tjiptoherijanto (1994:86) mengatakan bahwa secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah swasta, lembaga kementerian dan pengeluaran langsung oleh rumah tangga versi terbesar dari segi kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari pengeluaran rumah tangga. Program-



program di bidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut Tjiptoherijanto (1994: 90) menjelaskan, pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Menurut Todaro (2003: 404) kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangun ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.8 Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi (Sukirno, 2005).

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan

Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Deliarnov (1995:104) pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional (output nasional) adalah positif artinya jika investasi meningkat, maka output nasional juga akan mengalami peningkatan. Sementara itu menurut Sukirno (2001:367-368) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran rakyat. Peranan ini bersumber dari 3 unsur penting dalam perekonomian yaitu:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas memproduksi dimasa depan dan perkembangan ini akan menstimulir penambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan.

### **2.1.9 Definisi Variabel Terikat dan Tidak Terikat**

#### **2.1.9.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Kegunaan dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Langkah perhitungan Rata-rata Lama sekolah yaitu dengan 6 langkah, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun keatas
2. Mengelompokan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki
3. Mengelompokan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
4. Menghitung lamanya berssekolah sampai kelas akhir
5. Menghitung lamanya sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n X_i$$

Keterangan :

RLS = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas

$X_i$  = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas

### **2.1.9.2 Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Bonus demografi diperoleh jika angka ketergantungan rendah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

### **2.1.9.3 Penanaman Modal Asing (PMA)**

PMA atau investasi asing merupakan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari

usaha yang dilakukan. Menurut Jhingan, pemasukan modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik. Ia membuka daerah-daerah terpencil dan menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing. Selanjutnya, modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Ia meniadakan problem neraca pembayaran dan menurunkan tekanan inflasi. Modal asing membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor Negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi Negara-negara terbelakang.

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal dan kredit luar negeri:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan dalam Undang- Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Pengertian PMA diatas adalah penggunaan dari modal asing untuk

menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Peranan PMA dalam pembangunan adalah :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.

#### **2.1.9.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Didalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (domestik fixed capital formation). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (sustainable development). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya untuk mendukung penyiapan sumber daya manusia, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 1968

pengertian penanaman modal dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal 1 tahun. Menurut undang-undang tersebut pada pasal 3, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh Negara atau swasta nasional. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya yang sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang.

Sedangkan batas waktu dalam berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama dibatasi antara 10 tahun dan 30 tahun. Jika jangka waktu usaha bagi perusahaan asing telah berakhir, maka warga Negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dengan mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu usahanya belum berakhir dan mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. Setelah



waktu berusaha untuk perusahaan asing berakhir, maka perusahaan atau modal yang dimiliki oleh warga Negara asing yang bersangkutan harus dialihkan kepada warga Negara Indonesia. Jika perusahaan asing telah diberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali oleh instansi pemerintah yang berwenang, warga Negara asing yang tersebut dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu usahanya, maka pemerintah atau instansi terkait berhak melakukan likuiditas terhadap perusahaan asing tersebut.

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan dan menyelenggarakan usaha-usaha, agar pada waktunya perusahaan-perusahaan nasional dapat menampung dan melakukan fungsi serta kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang batas waktunya telah berakhir.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Menciptakan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.9.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Payman J.Simanjutak (2001) menyimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu kelompok penduduk tertentu dimana dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menyimpulkan bahwa untuk seluruh pendapat dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan bentuk suatu kelompok tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita dikota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10- 14 tahun di desa dan lain sebagainya. Secara singkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sama dengan jumlah angkatan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam suatu kelompok yang sama.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$$

Menurut Sumarsono, Sony (2003) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya TPK (Tingkat Partisipasi Kerja), antara lain :

1. Jumlah penduduk bersekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah , maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPK. Hal ini dipengaruhi tingkat penyediaan fasilitas pendidikan dan tingkat penghasilan keluarga

2. Umur

Penduduk berumur muda pada umumnya belum mempunyai tanggung yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga bahkan mereka umunya bersekolah. Penduduk dikelompokkan umur 22-55 tahun, terutama laki-laki, umunya dituntut untuk wajib mencari nafkah dan oleh sebab itu TPK relatif besar. Sedangkan penduduk diatas usia 55 tahun kemampuan bekerja sudah menurun,

dan TPK umumnya rendah

3. Jumlah penduduk mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPK. Suatu keluarga menentukan siapa bekerja, mengurus rumah tangga, dan bersekolah.

4. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk industry atau dengan kata lain semakin tinggi TPK

5. Tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga

Keluarga berpendapatan bahwa besar relative terhadap biaya hidup sehari-hari cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilnya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga bekerja, jadi TPK relatif tinggi.

6. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi kaum wanita, dengan semakin tinggi pendidikan kecenderungan untuk bekerja semakin besar, TPK akan semakin besar juga.

7. Kegiatan ekonomi

Program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang. Dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru..harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi maka TPK semakin besar.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliitian	Perbedaan Variabel
1	Nugroho Sbm (2014)	Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	1. Menganalisis Pengaruh pendidikan terhadap Pertubuhan Ekonomi Indonesia	1. Pendidikan di proxy dengan angka meleh huruf (AMH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB).	menggunakan variabel Angka Melek Hurup (AMH).
2	Puspasari Windy Astuti (2016)	Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Study pada 33 Provinsi di Indonesia)	Untuk mengetahui pengaruh investasi (PMA & PMDN) , tenaga kerja, ekspor neto dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	1. PMA memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena peningkatan investasi asing berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia	Menggunakan Variabel tenaga kerja, ekspor neto dan belanja pemerintah
				2. PMDN memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi , hal ini disebabkan karen PMDN bukan merupakan satu-satunya faktor yang berperan besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia	

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliitian	Perbedaan Variabel
				<p>3. Jumlah tenaga kerja di Indonesia memiliki hasil yang berpengaruh dan juga memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bertambahnya penduduk yang bekerja maka diharapkan produktiifitas dari tenaga kerja akan semakin meningkat sehingga hal ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi.</p>	
				<p>4. Ekspor neto belum mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi , karena perkembangan ekspor neto yang melambat dan sempat mengalami defisit.</p>	
				<p>5. Belanja pemerintah memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengimplikasikan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perkonomian.</p>	

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliitian	Perbedaan Variabel
3	Sodik dan Nuryadin (2005)	Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi kasus pada 26 provinsi di Indonesia pra dan pasca otonomi)	Menganalisis Investasi terhadap Pertubuhan Ekonomi regional ( 26 provinsi di Indonesia)	Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebelum diberlakukannya otonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PMA, dan PMDN. Sedangkan pasca otonomi daerah, PMA dan PMDN tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.	
4	Maulana, 2013	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat	menganalisi pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat	Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi positif secara signifikan oleh investasi dan tingkat pendidikan, sedangkan tenaga kerja hanya berpengaruh positif. Semakin tinggi jumlah investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang terjadi di tingkat kabupaten dan kota maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat	Menggunakan Variabel tenaga kerja, ekspor neto dan belanja pemerintah

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliitian	Perbedaan Variabel
5	Syamsurijal (2008)	Pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di sumatera selatan	untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan perkapita	perbaikan tingkat kesehatan ternyata secara langsung memberikan pengaruh yang buruk terhadap peningkatan pendapatan perkapita , sedangkan secara tidak langsung (melalui perbaikan tingkat pendidikan) memberikan pengaruh yang positif, yang mana tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan, perbaikan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perndapatan perkapita di sumatera selatan.	menggunakan variabel pendapatan perkapita.

No	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliitian	Perbedaan Variabel
6	Wulan Anggraeni (2011)	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Investasi Asing (PMA), dan Ekspor Terhadap PDRB di DKI Jakarta	Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Investasi Asing (PMA), dan Ekspor terhadap PDRB di DKI Jakarta. Variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB), sedangkan variabel bebasnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Investasi Asing (PMA) dan Ekspor. Data yang digunakan adalah time series yaitu periode 1987-2009.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB DKI Jakarta.	Menggunakan Variabel Ekspor terhadap PDRB.



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Harrod-Domar (dalam Todaro dan Smith, 2011), setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya. Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Sementara itu, menurut Solow (dalam Arsyad, 2004), pertumbuhan ekonomi bergantung kepada penyediaan pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal). Romer menambahkan bahwa peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menggabungkan ketiga teori tersebut dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, dan Investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen.

Tingkat pendidikan merupakan modal utama sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam pendidikan memberikan beberapa manfaat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pentingnya peranan pendidikan dalam menciptakan modal manusia (*human capital*) dalam mendorong dan meningkatkan produktifitas yang selanjutnya menjadi motor penggerak pertumbuhan.

kesehatan juga turut mempengaruhi kualitas Sumber daya manusia di Jawa Barat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Jika angka harapan hidup meningkat, berarti menandakan kesehatan semakin membaik, dan pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus.

Investasi merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai target pembangunan. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau swasta atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama sebuah pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat (Todaro, 1997:63). Namun apabila Pertumbuhan penduduk sangat pesat akan berakibat pada peningkatan jumlah kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut :

1. Variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten Provinsi Jawa Barat.
4. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten Provinsi Jawa Barat.